

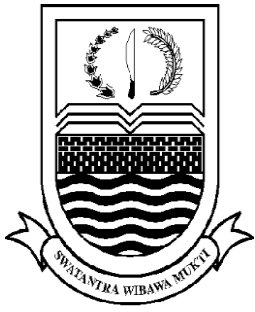
TAHUN
2023

BENCANA KERJA (BENJA) TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2023





Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp.021-89970065
Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : /DPMPTSP/Kep/2023

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2024..

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi (RPJMD) 2017-2024;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Nomor : 900/27.132.7/DPMPTSP /Kep/2022 tentang Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2024;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi selama 1 (satu) tahun;
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ini.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

H. SUHUP. SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah suatu Dokumen Perencanaan yang bersifat sistematis, taktis dan strategis serta berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi merupakan rumusan pernyataan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 – 2026 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi selama satu tahun kedepan.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kinerja bagi para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami mengakui dan menyadari bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sudah barang tentu masih terdapat Keterbatasan pemikiran.

Untuk itu diharapkan sumbang saran dan pendapat yang bersifat membangun demi sempurnanya Rencana Kerja Tahun 2024 ini. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran hingga tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini.

Bekasi, Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

H. SUHUP. SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Renja DPMPTSP adalah dokumen perencanaan DPMPTSP periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu DPMPTSP di Kabupaten Bekasi setiap tahun mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja. Penyusunan rencana kerja tersebut merupakan upaya perencanaan untuk mewujudkan visi dan misi DPMPTSP melalui serangkaian rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Pada proses penyusunan Renja DPMPTSP melalui beberapa tahapan diantaranya adalah perumusan Rancangan Rencana Kerja melalui Pengolahan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan DPMPTSP, Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu berdasarkan Renstra DPMPTSP, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP, Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, Perumusan tujuan dan sasaran, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, Perumusan kegiatan prioritas, Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPMPTSP, Penyempurnaan rancangan Renja DPMPTSP, Pembahasan forum DPMPTSP, dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPMPTSP sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan pimpinan.

Berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan baru diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, membawa perubahan yang mendasar bagi daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPMPTSP) diwajibkan untuk menyusun perencanaan tahunan dalam bentuk rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Visi dan Misi DPMPTSP yang ingin diwujudkan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun 2022 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi serta Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 – 2026.

Visi jangka menengah yang merupakan Visi Bupati Bekasi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun tentang 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi, dinyatakan sebagai berikut :

”Terwujudnya Kabupaten Bekasi BERSINAR (Berdaya saing, Sejahtera Indah dan Ramah Lingkungan)”

Visi jangka menengah tersebut diuraikan kedalam 8 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintah yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak.
6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pengembangan infrastruktur yang terpadu.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Bekasi disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 12);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 20) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 disusun dengan maksud memberikan arah, pedoman dan landasan bagi DPMPTSP dalam merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP adalah :

1. Untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan DPMPTSP dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMPTSP Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, proses penyusunan Renja DPMPTSP, keterkaitan antara Renja DPMPTSP dengan dokumen RKPD dan Renstra DPMPTSP. Selain itu menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan Renja DPMPTSP, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP, Analisis kinerja pelayanan DPMPTSP, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan hasil penelaahan kebijakan nasional, Hasil rumusan tujuan dan sasaran, Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab IV Penutup.

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 yang didalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Bekasi, maka perlu diikuti dengan perubahan Renstra DPMPTSP. Terkait dengan hal tersebut, DPMPTSP telah menyusun kembali Renstra DPMPTSP Tahun 2023 – 2026 yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 – 2026.

Visi jangka menengah Kabupaten Bekasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 dinyatakan sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Bekasi BERSINAR (Berdaya saing, Sejahtera Indah dan Ramah Lingkungan)"

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Misi Kabupaten Bekasi yang ke 3 yaitu :

"Memantapkan Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata"

MOTTO DPMPTSP

Motto DPMPTSP Kabupaten Bekasi adalah " C E R M A T " yang berarti Cepat, Ramah, Mudah, Akuntabel dan Transparan.

Nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

1. Cepat

Dimaksudkan sebagai pelaksanaan pelayanan perizinan dilaksanakan secara cepat sesuai dengan alokasi waktu yang telah disepakati dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Ramah

Dimaksudkan sebagai suatu sikap dalam diri untuk melakukan sesuatu selalu didasarkan pada ketulusan dan keikhlasan serta dengan penuh senyum.

3. Mudah

Dimaksudkan setiap kegiatan dilakukan secara bersama-sama melibatkan setiap unsur dalam organisasi, baik pimpinan maupun pelaksana untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam organisasi.

4. Akuntabel

Dimaksudkan sebagai pelaksanaan pelayanan perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan karena melalui suatu proses atau mekanisme penyusunan secara berjenjang mulai dari penerimaan, pemrosesan sampai dengan penerbitan izin yang berada dibawah kewenangannya.

5. Transparan

Dimaksudkan bahwa dalam setiap pemberian pelayanan perizinan dilaksanakan dengan menggunakan asas keterbukaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Capaian Kinerja DPMPTSP

No	Tahun	Jml Program	Jml Kegiatan	Pagu pendapatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2009	6	10	16.736.438.519	5.716.323.200	BPPT
2	2010	6	8	44.041.052.800	8.073.051.500	BPPT
3	2011	6	12	43.991.531.991	8.813.023.000	BPPT
4	2012	6	18	88.708.363.682	13.686.299.568	BPPT
5	2013	7	44	129.252.671.214	23.041.069.000	BPMPPT
6	2014	7	30	154.350.000.920	24.452.213.000	BPMPPT
7	2015	7	32	128.250.021.400	22.487.592.000	BPMPPT
8	2016	8	34	152.500.016.008	23.859.197.085	BPMPPT
9	2017	7	30	143.717.985.662	22.544.610.000	DPMPTSP
10	2018	7	31	175.000.000.000	28.713.274.000	DPMPTSP
11	2019	7	26	130.000.000.000	28.888.733.906	DPMPTSP
12	2020	6	25	110.000.000.000	28.590.125.451	DPMPTSP
13	2021	6	12	100.000.000.000	30.501.697.819	DPMPTSP
14	2022	6	13	90.000.000.000	27.866.415.695	DPMPTSP

Permasalahan dan Penanganannya

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan.
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen di bidang pelayanan perizinan.
4. Pelayanan Perizinan Masih ada keterkaitan dengan SKPD lain.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan khususnya terkait dengan pelayanan perizinan;
2. Secara bertahap berupaya untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan;
3. Membangun jaringan Sistem Informasi Manajemen khususnya pada bidang pelayanan perizinan yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi.
4. Merekrut Tim Tehnis Perizinan dari SKPD lain.
5. Mengotimalkan Pelayanan Satu Pintu
6. Melakukan Inovasi Pelayanan Perizinan.

Hasil evaluasi kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, capaian program kegiatan rata-ratanya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian prosentase program sebesar 94.25 %.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, capaian prosentase Program sebesar 98.96 %. (Reufuching)
3. Program Promosi Penanaman Modal capaian prosentase program sebesar 80.18 %.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal capaian prosentase program sebesar 92.54 %. (Adanya salah Satu kegiatan yang gagal lelang).

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal capaian prosentase program sebesar 69.51 %.
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, capaian prosentase program sebesar 87.06 %.

Belum tercapainya beberapa target sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2022, antara lain disebabkan :

Dengan Adanya

1. Adanya Surat Edaran Perubahan standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
2. Sisa proses pengadaan barang/jasa
3. Tidak menyerap tenaga pendamping karena sudah ada tenaga pendamping yang diangkat di Sekretariat.
4. Adanya wabah Pandemi Covid 19.

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BEKASI

BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEADAAN SAMPAI DENGAN : JANUARI S/D DESEMBER 2022

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URAIAN	LOKA SI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK		Keteranga n
				(Rp.)	(%)		K	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		27.868.951.695	26.091.718.623	93,62			96,06	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		25.883.625.880	24.395.603.973	94,25	100	98,00	98,32	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersusunnya dokumen perencanaan		100.000.000	94.690.000	94,69	10	10	100,00	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		36.980.000	36.980.000	100,00	6	6	100,00	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		63.020.000	57.710.000	91,57	4	4	100,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Tersusunnya laporan keuangan		18.772.955.000	18.189.050.165	96,89	2	2	96,25	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama 12 bulan		18.742.955.000	18.159.445.365	96,89	80	71	88,75	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun		30.000.000	29.604.800	98,68	1	1	100,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Jumlah Pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya		838.104.000	785.147.400	93,68	80	73	97,81	

2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - <i>Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan</i>		199.604.000	163.547.400	81,94	36	36	100,00	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - <i>Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		414.500.000	397.600.000	95,92	73	73	100,00	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - <i>Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>		224.000.000	224.000.000	100,00	73	73	100,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - <i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</i>		1.398.463.000	1.192.860.352	85,30	100	95,24	97,71	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		600.000.000	527.271.532	87,88	50	50	100,00	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - <i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>		37.500.000	16.117.200	42,98	6	6	100,00	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - <i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>		189.463.000	154.333.620	81,46	33	33	100,00	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu - <i>Jumlah tamu yang terfasilitasi</i>		12.500.000	12.180.000	97,44	19	19	100,00	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - <i>Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah</i>		309.000.000	235.245.000	76,13	80	71	88,75	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - <i>Jumlah arsip dinas perangkat daerah yang tertata</i>		250.000.000	247.713.000	99,09	1	1	100,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang diadakan</i>		1.327.048.680	1.293.763.156	97,49	38	38	100,00	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan</i>		1.327.048.680	1.293.763.156	97,49	38	38	100,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Tersediannya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah selama 12 Bulan</i>		2.874.151.200	2.346.992.184	81,66	100	100	100,00	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan</i>		731.271.200	508.948.726	69,60	100	100	100,00	

2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		2.142.880.000	1.838.043.458	85,77	68	68	100,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah barang milik daerah pada SKPD dalam Kondisi baik		572.904.000	493.100.716	86,07	34	34	100	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang terpelihara		199.999.000	169.570.300	84,79	20	20	100,00	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara		372.905.000	323.530.416	86,76	14	14	100,00 100,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)		386.671.075	382.660.250	98,96	1	1	100,00 100,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		256.020.900	253.644.500	99,07			100,00	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Jumlah Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		256.020.900	253.644.500	99,07	1	1	100,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha		130.650.175	129.015.750	98,75	1	1	100,00	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota - Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yang tersedia		130.650.175	129.015.750	98,75	1	1	100,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)		428.358.000	343.445.100	80,18	2	2	100,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal		428.358.000	343.445.100	80,18	2	2	100,00	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal - Jumlah dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal		77.925.000	77.073.000	98,91	1	1	100,00	

2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal</i>		350.433.000	266.372.100	76,01	2	2	100,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - <i>Persentase ketepatan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan</i>		471.146.740	435.999.000	92,54	<i>100</i>	<i>100</i>	100,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - <i>Terwujudnya Aplikasi Peta Izin Lokasi</i>		471.146.740	435.999.000	92,54	<i>1</i>	<i>1</i>	100,00	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - <i>Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>		471.146.740	435.999.000	92,54	<i>1</i>	<i>1</i>	100,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - <i>Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)</i>		425.464.000	295.731.400	69,51	<i>3</i>	<i>3</i>	100,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - <i>Laporan</i>		425.464.000	295.731.400	69,51	<i>3</i>	<i>3</i>	100	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - <i>Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>		40.550.000	23.960.000	59,09	<i>1</i>	<i>1</i>	100	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - <i>Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaaan Penanaman Modal</i>		353.664.000	254.246.400	71,89	<i>1</i>	<i>1</i>	100,00	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal - <i>Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>		31.250.000	17.525.000	56,08	<i>1</i>	<i>1</i>	100	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - <i>Persentase ketepatan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan</i>		273.686.000	238.278.900	87,06	<i>100</i>	<i>100</i>	100,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - <i>Terwujudnya Pelayanan Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan</i>		273.686.000	238.278.900	87,06	<i>1</i>	<i>1</i>	100,00	

2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Jumlah Sistem Elektronik dalam Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang digunakan		273.686.000	238.278.900	87,06	1	1	100,00	
-----------------	---	--	-------------	-------------	-------	---	---	--------	--

Bekasi, Desember 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

H. SUHUP, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DARI TAHUN 2011 S/D 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Pencapaian	Ket.
1	2011	8.813.023.000	8.143.505.408	669.517.592	92,40	Prog: 6 Kgt.: 12
2	2012	13.686.299.568	12.069.460.589	5.032.611.023	88,18	Prog: 6 Kgt.: 18
3	2013	23.041.069.000	20.232.051.964	2.809.017.036	88,00	Prog: 7 Kgt.: 44
4	2014	24.452.213.000	22.045.670.668	2.411.542.332	90,16	Prog: 7 Kgt.: 30
5	2015	22.487.592.000	19.436.830.572	3.050.761.428	86,43	Prog: 7 Kgt.: 32
6	2016	23.859.197.085	21.355.783.470	2.503.413.615	89,51	Prog: 8 Kgt.: 34
7	2017	22.544.610.000	20.627.393.905	1.917.216.095	78,54	Prog: 7 Kgt.: 27
8	2018	29.723.174.000	23.345.841.468	6.377.332.532	78,54	Prog: 7 Kgt.: 31
9	2019	28.888.733.906	23.591.481.573	5.297.252.333	81,66	Prog: 7 Kgt.: 26
10	2020	28.590.125.451	24.752.455.451	3.837.670.000	86,58	Prog: 6 Kgt.: 25
11	2021	30.501.697.819	24.926.487.046	5.575.210.773	80,93	Prog: 6 Kgt.:12
12	2022	27.868.951.695	26.091.718.623	1.777.233.072	93,62	Prog: 6 Kgt.:13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Menghadapi perencanaan Tahun 2024 isu-isu pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, masih berkisar pada peningkatan Pelayanan perizinan, baik internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun dengan lembaga legeslatif. Disamping itu peningkatan sumber daya manusia (SDM), penyediaan database perencanaan dan peningkatan etos kerja pegawai juga perlu mendapat perhatian pada DPMPTSP Tahun 2024. Serta Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Pengembangan Sistem Aplikasi SICANTIK

Permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan.
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen di bidang pelayanan.
4. Masih ada keterkaitan dengan SKPD lain.
5. Belum Optimalnya sistem Aplikasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparat DPMPTSP melalui pendidikan dan pelatihan khususnya terkait dengan pelayanan perizinan;
2. Optimalisasi kinerja DPMPTSP melalui pembagian tugas yang jelas.
3. Meningkatkan pengawasan melekat dan penilaian aparatur DPMPTSP.
4. Secara bertahap berupaya untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Meningkatkan koordinasi baik intern DPMPTSP maupun dengan SKPD lain dan Legislatif.
6. Melakukan kajian-kajian dan survey untuk menyusun Perda;
7. Membangun jaringan Sistem Informasi Manajemen khususnya pada bidang pelayanan perizinan yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi;
8. Meningkatkan promosi investasi;
9. Mengembangkan kebijakan DPMPTSP yang aspiratif dan partisipatif;
10. Mensosialisasikan DPMPTSP kepada masyarakat dan swasta;
11. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran DPMPTSP;
12. Merekrut Tim Tehnis dari SKPD Lain;
13. Mengembangkan Sistem Aplikasi Perijinan.
14. Meningkatkan Pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP).

Kebijakan

Dalam upaya melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan dan pengembangan pemberian pelayanan perizinan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan SDM di bidang Pelayanan Perizinan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran;
3. Melaksanakan tertib administrasi pelayanan perkantoran;
4. Mensinergikan pelayanan perizinan secara terpadu;
5. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan secara terpadu;
6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang telah menjadi kewenangannya;
7. Penyediaan data base pelayanan perizinan yang telah menjadi kewenangannya yang berbasis pada penggunaan teknologi;

8. Mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring pelayanan perizinan;
9. Mengembangkan kerjasama pelayanan perizinan dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya.
10. Mengembangkan promosi investas.
11. Mengembangkan sistem aplikasi perijinan secara online.
12. Mengembangkan Mall Pelayanan Publik (MPP).
13. Mempermudah Proses Perijinan

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan bertanggungjawab kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas pokok dalam mengkoordinasikan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Perizinan.
2. Pelaksanaan Penyusunan Program Dinas.
3. Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Penanaman Modal dan Perizinan.
4. Pelaksanaan koordinasi proses Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.
5. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2022, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahkan :

- a. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Keuangan
3. Koordinator yang Melaksanakan Fungsi Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman Modal, membawahkan :
- a. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Pengembangan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal
 - b. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal.
4. Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Perizinan tata Ruang dan Bangunan.
- a. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Pendaftaran Perijinan Tata Ruang dan Bangunan.
 - b. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Penerbitan Perijinan Tata Ruang dan bangunan.
5. Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Perizinan Sosial dan Ekonomi.
- a. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Pendaftaran Perijinan Perizinan Sosial dan Ekonomi.
 - b. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Penerbitan Perijinan Sosial dan Ekonomi.
6. Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan
- a. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Informasi dan Pengaduan Perijinan.
 - b. Sub Koordinator Yang Melaksanakan Fungsi Evaluasi dan Pengendalian Perijinan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2022 disesuaikan dengan prioritas kegiatan DPMPTSP, disamping itu memperhatikan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026, maka rincian prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 yang dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2022

RENJA BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020										PERANGKAT DAERAH
Pagu Indikatif	Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
30,000,000	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20,000,000	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
50,000,000	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	3 Dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

445,000,000	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76 Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaianya	76 Orang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
235,000,000	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	76 Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaianya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
200,000,000	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	76 stel	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaianya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
439,500,000	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 sistem	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Layanan Publik dan Perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500,000,000	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	76 Orang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

200,000,000	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Jenis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25,000,000	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	512 jenis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
75,000,000	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	910 orang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
700,000,000	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	32 Jenis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
300,000,000	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinas perangkat daerah yang tertata	2 jenis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1,006,400,000	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	20 unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	35 unit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
493,600,000	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15 unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
959,000,000	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2,391,000,000	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	42 Orang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
184,000,000	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang terpelihara	18 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada SKPD dalam kondisi baik	90 unit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

244,860,000	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	70 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada SKPD dalam kondisi baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
731,640,000	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada SKPD dalam kondisi baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
200,000,000	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 Laporan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
200,000,000	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Laporan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
150,000,000	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Laporan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 regulasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1,300,000,000	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik dalam Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang digunakan	2 jenis	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500,000,000	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	6 event	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 event	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
200,000,000	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	2 dokumen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
200,000,000	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yang tersedia	1 dokumen	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang tersedia	1 dokumen	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11,980,000,000										

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya Volume	Catatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Bekasi	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Tingkat kehadiran pegawai, Nilai capaian SKP pegawai dengan kategori baik, Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Terwujudnya program peningkatan dan pengamalan agama di masyarakat, Cakupan layanan publik dan perijinan	100 %	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bekasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dok	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bekasi	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	2 Dok	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bekasi	Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya	76 Orang	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Bekasi	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Bekasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	35 unit	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bekasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan	100 %	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bekasi	Jumlah barang milik daerah pada SKPD dalam kondisi baik	50 Unit	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab.Bekasi	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	100 %	
8	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bekasi	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab.Bekasi	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	100%	
9	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bekasi	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	100 %	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab.Bekasi	Persentase Tingkat Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	2 Dok	
10	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bekasi	Persentase Tingkat Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	2 Dok	
V	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab.Bekasi	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	6 Event	
11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bekasi	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 Event	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab.Bekasi	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	1 Dok	
12	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab.Bekasi	Jumlah Peta Potensi Investasi yang tersedia	1 Dok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Perpres 97 Tahun 2014 tentang PTSP maka DPMPTSP Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMPTSP

Tujuan

Pembentukan dan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini mempunyai maksud sebagai suatu Dinas yang memberikan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan bagi seluruh pelaku dunia usaha yang melakukan aktifitas usahanya di wilayah Kabupaten Bekasi.

Sasaran

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan DPMPTSP yang konsisten dengan perencanaan jangka menengah Kabupaten Bekasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

V. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

VI. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal.

Memperhatikan program-program tersebut di atas, maka prioritas program dan kegiatan DPMPTSP untuk Tahun 2024 setelah melalui pembahasan serta disesuaikan dengan Program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 - 2026 dan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024, yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pelayanan Penanaman Modal
- 3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 6 Program Promosi Penanaman Modal.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

V. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

VI. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jumlah			KETERANGAN	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja						Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Prog	Kgt	Sub Kgt		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
218					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									28.029.582.203				28.236.194.206				
21801					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									24.730.082.203				25.739.194.206	1			
218012,01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									209.126.000				221.000.000		1		
218012,0101	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersediannya Dukumen Perencanaan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	(PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	65.000.000			1	Perencanaan	
218012,0102	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.590.000	(PAD)		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen	24.000.000			2	Perencanaan	
218012,0103	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.590.000	(PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 Dokumen	24.000.000			3	Perencanaan	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024																						
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.590.000	(PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11 Dokumen	24.000.000			4	Perencanaan
2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.590.000	(PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11 Dokumen	24.000.000			5	Perencanaan
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	58.766.000	(PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Dokumen	60.000.000			6	Perencanaan
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18.982.185.000					18.990.185.000		2		
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya dokumen laporan Keuangan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	72 Orang/bu	100%	18.958.185.000	(PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	18.958.185.000			7	Keuangan
2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya dokumen laporan Keuangan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	1 Laporan	100 %	12.000.000	(PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	16.000.000			8	Keuangan
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD "	Tersediannya dokumen "laporan Keuangan ran	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	1 Laporan	100 %	12.000.000	(PAD)	N	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD "	100 %	16.000.000			9	Keuangan
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								465.000.000					510.000.000		3		
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian dan kompetensi pegawai"	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	72 Paket	72 Orang	65.000.000	(PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	70.000.000			10	Umpeg

2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian dan kopetensi pegawai"	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	72 Orang	72 Orang	400.000.000	(PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 %	440.000.000			11	Umpeg
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.355.000.000				1.995.000.000		4		Umpeg	
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	20 Paket	100 %	350.000.000	(PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	500.000.000			12	Umpeg
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	20 Paket	100 %	35.000.000	(PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	55.000.000			13	Umpeg
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	36 Paket	100 %	250.000.000	(PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	500.000.000			14	Umpeg
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	20 Laporan	100 %	20.000.000	(PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	35.000.000			15	Umpeg
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	72 Laporan	100 %	500.000.000	(PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	670.000.000			16	Umpeg
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	1 Dokumen	100 %	200.000.000	(PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	235.000.000			17	Umpeg
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								740.000.000				1.000.000.000		5		Umpeg	
2	18	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	2 Unit	100 %	500.000.000	(PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	700.000.000			18	Umpeg
2	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	2 Unit	100 %	240.000.000	(PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	300.000.000			19	Umpeg

2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.676.400.000					2.693.009.206		6		Umpeg
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersediannya jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Selama 12 Bulan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	12 Laporan	12 Bulan	176.400.000	(PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	193.009.206		20	Umpeg
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersediannya jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Selama 12 Bulan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	54 Laporan	12 Bulan	2.500.000.000	(PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	2.500.000.000		21	Umpeg
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							302.371.203					330.000.000		7		Umpeg
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	10 Unit	100 %	122.371.203	(PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	130.000.000		22	Umpeg
2	18	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	100 %	20 Unit	100 %	180.000.000	(PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	200.000.000		23	Umpeg
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							283.500.000					300.000.000	2			
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0					0		8		
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Jumlah Naskah Akademik dan Revisi Draft Raperda Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksanannya Penetapan kebijakan dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	0	(PAD))		Jumlah Naskah Akademik dan Revisi Draft Raperda Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	0		24	PMD
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							283.500.000					300.000.000		9		

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024																				
218	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Jumlah Revisi Draft raperda	Tersediannnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Modal"	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	0	(PAD)		Jumlah Revisi Draft raperda	4 Dokumen	0		25	PMD
218	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersediannnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Modal"	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	283.500.000	(PAD)		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	300.000.000		26	PMD
218	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								441.000.000				467.000.000	3			
218	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								441.000.000				467.000.000		10		
218	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen dalam penyusunan strageti promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah Iklan Promosi yang terpasang Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi promosi penanaman modal"	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	126.000.000	(PAD)		Jumlah Iklan Promosi yang terpasang Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	137.000.000		27	PMD

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024																						
218	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam penyusunan strageti promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi promosi penanaman modal"	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	315.000.000	(PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	330.000.000			28		PMD
218	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								1.680.000.000					1.160.000.000	4				
218	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								1.680.000.000					1.160.000.000		11			
218	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	1600 Pelaku Usaha	1600 Pelaku Usaha	1600 Pelaku Usaha	1.680.000.000	(PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1600 Pelaku Usaha	1.160.000.000			29		EPELIN,TRB,SOSEK
218	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								315.000.000					347.000.000	5				
218	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								315.000.000					347.000.000		12			
218	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	Tersediannya laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan,pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Laporan	40 kegiatan Usaha	3 Dokumen	78.750.000	(PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	3 Laporan	90.000.000			30		PMD
218	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersediannya laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan,pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Laporan	100 Pelaku Usaha	3 Dokumen	157.500.000	(PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 Laporan	172.000.000			31		PMD

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024																						
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan pengawasan	Tersediannya laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan,pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	3 Laporan	20 Kegiatan Usaha	3 Dokumen	78.750.000	(PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan pengawasan	3 Laporan	85.000.000			32	PMD
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							580.000.000				223.000.000	6					
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							580.000.000				223.000.000		13				
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersediannya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab.Bekasi,Cikarang Pusat,Sukamahi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	580.000.000	(PAD))		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	223.000.000			33	EPELIN
TOTAL													28.029.582.203				28.236.194.206	6	13	33		

Program	:	6
Kegiatan	:	13
Sub Kegiatan	:	33
PaguAnggaran	:	28.029.582.203
Gaji/Upah	:	18.958.185.000
Pagu Kegiatan	:	9.071.397.203

Bekasi, Maret 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

H. SUHUP, SH. MM.
NIP. 19641208 198603 1 018

**Kabupaten Bekasi
Tahun 2024**

inisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENCANA PROGRAM DAN KEIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN/BIDANG AN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024	Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
EMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
EMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				28.029.582.203	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.730.082.203	
an, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				209.126.000	
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersediannya Dukumen Perencanaan	60.000.000	
an Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	22.590.000	
an Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	22.590.000	
an Penyusunan DPA-SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	22.590.000	
an Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	22.590.000	
an Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan sasi Kinerja SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dukumen Perencanaan	58.766.000	

i Keuangan Perangkat Daerah					18.982.185.000	
Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya dokumen laporan Keuangan	18.958.185.000		
an Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya dokumen laporan Keuangan	12.000.000		
an Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Tersediannya dokumen laporan Keuangan ran	12.000.000		
i Kepegawaian Perangkat Daerah					465.000.000	
akaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian dan kopetensi pegawai	65.000.000		
eknis Implementasi Peraturan Perundang-	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian dan kopetensi pegawai"	400.000.000		
i Umum Perangkat Daerah					1.355.000.000	
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	350.000.000		
Bahan Logistik Kantor	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	35.000.000		
barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	250.000.000		
jumlah Tamu	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	20.000.000		
raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	500.000.000		
an Arsip Dinamis pada SKPD	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersediannya sarana prasarana Administrasi Umum	200.000.000		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					740.000.000	
arana dan Prasarana Gedung Kantor atau lainnya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	500.000.000		
arana dan Prasarana Pendukung Gedung Bangunan Lainnya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	240.000.000		

Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.676.400.000	
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersediannya jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Selama 12 Bulan	176.400.000		
Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersediannya jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Selama 12 Bulan	2.500.000.000		
n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					302.371.203	
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	122.371.203		
/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung or atau Bangunan Lainnya	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	180.000.000		
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					283.500.000	
Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	
Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Jumlah Naskah Akademik dan Revisi Draft Raperda Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksanannya Penetapan kebijakan dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0		
Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					283.500.000	
Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Jumlah Revisi Draft raperda	Tersediannya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Modal"	0		
Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersediannya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Modal"	283.500.000		
PROMOSI PENANAMAN MODAL					441.000.000	
Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					441.000.000	

Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen dalam penyusunan strageti promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah Iklan Promosi yang terpasang Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi promosi penanaman modal"	126.000.000	
Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	Jumlah dokumen dalam penyusunan strageti promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi promosi penanaman modal"	315.000.000	
PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.680.000.000	
Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.680.000.000	
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksanannya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	1.680.000.000	
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				315.000.000	
Pantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				315.000.000	
Pantauan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	Tersediannya laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan,pembinaan dan pengawasan penanaman modal	78.750.000	
Pantauan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersediannya laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan,pembinaan dan pengawasan penanaman modal	157.500.000	
Pantauan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan pengawasan	Tersediannya laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan,pembinaan dan pengawasan penanaman modal	78.750.000	
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				580.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya didasarkan pada usulan dari bidang-bidang dan bagian di lingkungan DPMPTSP. Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tercantum dalam Renja DPMPTSP merupakan indikasi yang hendak dicapai pada Tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Renja DPMPTSP Tahun 2024 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, Renstra DPMPTSP Tahun 2023 - 2026 dan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Sebelum ditetapkan Rancangan Renja DPMPTSP dibahas terlebih dahulu dalam Forum DPMPTSP dan Musrenbang Kabupaten sebagai bahan perumusan prioritas program dan kegiatan strategis yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya setelah dilakukan pemutakhiran dari hasil kesepakatan pada Musrenbang Kabupaten dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024, Naskah akhir Renja ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP.

Keputusan Kepala DPMPTSP Tentang Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPMPTSP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-DPMPTSP) sebagai bahan awal penyusunan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 dan menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Bekasi, Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

**H. SUHUP. SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018**